



Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Oleh:

Muhlis¹⁾, Novita Anggraeni²⁾ Mujito³⁾

^{1,2} Institut Teknologi dan Bisnis Dewantara
Acropolis Blok LC 19 Jl. Raya Pemda Bojong Depok Baru III,
Karadenan, Cibinong, Bogor ^{1,2,3}

E-Mail:

mmuhlis2013@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan fokus pada penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah, dan defisit anggaran selama periode 2014-2024. Kebijakan fiskal mempengaruhi berbagai aspek perekonomian, termasuk konsumsi dan investasi, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang mencakup data PDB tahunan, penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah, dan defisit anggaran. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan uji asumsi klasik untuk memastikan kualitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDB, dengan nilai signifikansi sebesar 0,046 yang lebih kecil dari 0,05. Peningkatan penerimaan pajak dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah untuk mendanai pembangunan, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: kebijakan fiskal, pajak, produk domestik bruto

Abstract

This study aims to analyze the impact of fiscal policy on Indonesia's economic growth, focusing on tax revenue, government expenditure, and the budget deficit during the period of 2014-2024. Fiscal policy affects various aspects of the economy, including consumption and investment, which in turn impact economic growth. The data used in this study is sourced from the Central Statistics Agency (BPS) and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, covering annual GDP data, tax revenue, government expenditure, and the budget deficit. The analytical method employed is multiple linear regression, with classical assumption tests to ensure data quality. The results indicate that tax revenue has a significant impact on GDP growth, with a significance value of 0.046, which is less than 0.05. An increase in tax revenue can strengthen the government's fiscal capacity to finance development, which, in turn, stimulates economic growth.

Keywords: Fiscal policy, taxes, Gross Domestic Product



PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal adalah alat utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian suatu negara. Di Indonesia, kebijakan ini mencakup pengaturan anggaran belanja dan perpajakan, dengan tujuan utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperbaiki kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas makroekonomi. Perubahan dalam kebijakan fiskal sangat penting untuk merespons tantangan ekonomi yang timbul dari dinamika domestik dan global, termasuk dampak pandemi dan perubahan kondisi pasar internasional.

Kebijakan fiskal Indonesia, terutama dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan upaya pemerintah untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran publik dan kebijakan perpajakan. Pada tahun 2023, alokasi anggaran untuk belanja infrastruktur mencapai Rp300 triliun, meningkat dari Rp275 triliun pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan fokus pemerintah pada pengembangan infrastruktur sebagai motor penggerak ekonomi yang dapat memperbaiki kapasitas dan konektivitas nasional (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2023). Selain itu, kebijakan perpajakan juga berperan penting dalam mendukung perekonomian. Penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp1.800 triliun, meningkat 12% dari Rp1.607 triliun pada tahun 2022. Peningkatan penerimaan pajak ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan, yang memungkinkan pendanaan lebih besar untuk belanja publik dan program-program penting (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Menganalisis data pertumbuhan ekonomi dalam konteks kebijakan fiskal memberikan wawasan tentang dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian. Pada tahun 2020, Indonesia mengalami kontraksi ekonomi sebesar -2,1% akibat dampak pandemi COVID-19 (Badan Pusat Statistik, 2020). Untuk mengatasi dampak ini, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, termasuk paket stimulus dan peningkatan belanja sosial. Sebagai hasilnya, pada tahun 2021, ekonomi mulai pulih dengan pertumbuhan sebesar 3,7%, didorong oleh kebijakan fiskal yang mendukung pemulihan sektor-sektor yang terdampak pandemi (Badan Pusat Statistik, 2021).

Pertumbuhan ekonomi berlanjut pada tahun 2022 dengan angka 5,3% (Badan Pusat Statistik, 2022). Kenaikan ini dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang berfokus pada pemulihan ekonomi pasca-pandemi, termasuk peningkatan belanja infrastruktur dan insentif pajak. Namun, pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi sedikit melambat menjadi 5,1% (Badan Pusat Statistik, 2023). Meskipun ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ini tetap menunjukkan dampak positif dari kebijakan fiskal, yang terus mendorong perkembangan ekonomi melalui belanja infrastruktur yang signifikan dan penerimaan pajak yang meningkat.

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal Indonesia telah memainkan peran yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi meskipun terdapat tantangan eksternal dan internal. Pengeluaran pemerintah dan kebijakan perpajakan yang diterapkan memberikan



kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kondisi yang mendukung pemulihan dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Penelitian tentang pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat penting karena kebijakan fiskal mempengaruhi berbagai aspek perekonomian, seperti konsumsi dan investasi. Memahami dampaknya dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah dan defisit anggaran terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia pada periode 2014-2024.

LANDASAN TEORI

Teori Keynesian menganggap bahwa intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dapat membantu mengatasi ketidakseimbangan ekonomi. Menurut Keynes (1936), dalam situasi ketidakstabilan ekonomi seperti resesi, pengeluaran pemerintah yang meningkat dapat merangsang permintaan agregat, yang kemudian dapat meningkatkan produksi dan mengurangi pengangguran. Konsep ini dikenal sebagai "efek multiplier", di mana setiap tambahan pengeluaran pemerintah akan menghasilkan peningkatan output yang lebih besar dalam perekonomian (Mankiw, 2014). Keynesianisme menyarankan bahwa pemerintah harus secara aktif mengelola siklus ekonomi dengan menyesuaikan kebijakan fiskal untuk menghindari dampak negatif dari fluktuasi ekonomi.

Teori Klasik, di sisi lain, berargumen bahwa pasar akan menyesuaikan diri untuk mencapai keseimbangan tanpa memerlukan intervensi pemerintah. Teori ini, yang dipelopori oleh Adam Smith dan David Ricardo, berpendapat bahwa harga dan upah fleksibel akan memungkinkan pasar untuk secara otomatis mengoreksi ketidakseimbangan dalam perekonomian (Smith, 1776; Ricardo, 1817). Dalam pandangan klasik, kebijakan fiskal yang terlalu aktif dapat mengganggu mekanisme pasar dan menyebabkan distorsi ekonomi. Oleh karena itu, teori ini lebih mengutamakan kebijakan yang membatasi peran pemerintah dan memungkinkan pasar berfungsi secara efisien.

Teori Pertumbuhan Endogen menyoroti peran kebijakan fiskal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui investasi dalam modal manusia, teknologi, dan infrastruktur. Paul Romer dan Robert Lucas, yang mengembangkan teori ini, berpendapat bahwa inovasi dan pengetahuan dapat ditingkatkan melalui kebijakan pemerintah yang mendukung penelitian dan pengembangan serta pendidikan (Romer, 1990; Lucas, 1988). Menurut teori ini, kebijakan fiskal yang berfokus pada investasi dalam sektor-sektor produktif dan peningkatan kapasitas manusia dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produktivitas.

Teori Multiplier Fiskal menjelaskan bahwa perubahan dalam pengeluaran atau pajak pemerintah dapat menghasilkan efek berlipat pada output ekonomi. Teori ini dikembangkan dari pandangan Keynesian dan menyatakan bahwa setiap tambahan pengeluaran pemerintah atau pengurangan pajak akan mengarah pada peningkatan pendapatan yang kemudian



dihabiskan kembali dalam perekonomian, menghasilkan efek ganda pada permintaan agregat. Besarnya multiplier dapat bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi dan seberapa cepat pendapatan tambahan dihabiskan (Keynes, 1936; Blanchard & Johnson, 2013).

Teori Ricardian Equivalence mengemukakan bahwa kebijakan fiskal tidak akan mempengaruhi permintaan agregat karena individu akan menyesuaikan tabungan mereka untuk mengantisipasi perubahan dalam pajak di masa depan. Menurut teori ini, jika pemerintah membiayai pengeluaran melalui utang, masyarakat akan mengurangi konsumsi mereka untuk menabung sebagai persiapan untuk pajak yang lebih tinggi di masa depan. Dengan kata lain, teori ini mengklaim bahwa kebijakan fiskal ekspansif mungkin tidak efektif dalam merangsang perekonomian jika individu melakukan penyesuaian yang sesuai (Barro, 1974).

Teori Cyclical Adjustment menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan fiskal sesuai dengan siklus ekonomi untuk mengurangi dampak fluktuasi ekonomi. Dalam teori ini, disarankan agar pemerintah meningkatkan pengeluaran dan mengurangi pajak selama resesi untuk merangsang permintaan, dan sebaliknya mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pajak selama periode ekspansi untuk mencegah overheating ekonomi (Mankiw, 2014). Pendekatan ini bertujuan untuk memitigasi dampak siklus ekonomi dan menjaga stabilitas makroekonomi.

Hasil penelitian empiris terbaru juga mendukung berbagai teori ini. Studi oleh Kong et al. (2021) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa belanja infrastruktur yang efisien dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

Batini et al. (2021) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif selama krisis ekonomi global dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan mengurangi dampak resesi. Penelitian ini menyoroti pentingnya desain kebijakan fiskal yang responsif dan terarah untuk mendukung pemulihan ekonomi jangka panjang.

Studi oleh Alesina et al. (2022) meneliti dampak dari kebijakan fiskal yang fokus pada reformasi pajak dan menemukan bahwa kebijakan tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi ketidakpastian ekonomi dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya.

Gómez-Puig dan Sosvilla-Rivero (2023) meneliti hubungan antara kebijakan fiskal dan stabilitas ekonomi di negara-negara zona euro dan menemukan bahwa kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif dapat mengurangi volatilitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan.

Yong et al. (2024) mengkaji dampak kebijakan fiskal terhadap ketimpangan ekonomi di negara-negara emerging markets dan menemukan bahwa kebijakan yang lebih terarah dapat membantu mengurangi ketimpangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.



METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan data kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi periode 2014-2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data tersebut meliputi: 1) pertumbuhan ekonomi, data tentang produk domestik bruto (PDB) secara tahunan dan 2) penerimaan pajak, 3) pengeluaran pemerintah, pendapatan pemerintah dan 4) defisit anggaran.

Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh antara dua atau lebih variabel independent dengan satu variabel dependent. Proses analisis dimulai dengan pemeriksaan data menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi: normalitas, multikolinearitas, auto korelasi dan heteroskedastisitas. Model regresi linier berganda pada penelitian ini dituliskan sebagai berikut:

$$PDB = \beta_0 + \beta_1 \text{ Penerimaan Pajak} + \beta_2 \text{ Pengeluaran Pemerintah} + \beta_3 \text{ Defisit Anggaran} + e$$

Pengujian hipotesa dilakukan menggunakan uji t dengan melihat nilai signifikansi dari hasil hitung. Evaluasi model dilakukan dengan melihat nilai koefisien determinasi yang dapat menjelaskan proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini dapat terpenuhi, yang meliputi data dalam penelitian berdistribusi normal, tidak terjadi gejala multikolineritas, tidak terjadi gejala heterokedastisitas dan tidak terjadi auto korelasi negatif. Meskipun dalam pengujian auto korelasi positif tidak dapat disimpulkan, nilai durbin-watson berada diantara -2 sampai dengan 2 sehingga dapat dikatakan tidak terjadi auto korelasi.

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t dapat dilihat dapat tabel 1 dibawah, menunjukkan bahwa penerimaan pajak yang berpengaruh terhadap pertumbuhan domestik bruto (PDB) dengan nilai sig yang lebih kecil dari 0,05. Nilai sig penerimaan pajak sebesar 0,046 lebih kecil dari 0,05.

Tabel 1. Hasil uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-123520.403	675319.813		-.183	.860
	Penerimaan_Pajak	7.393	3.047	.772	2.427	.046
	Peng_Pemerintah	1.137	2.504	.171	.454	.664
	Defisit_Anggaran	3.254	2.712	.193	1.200	.269

a. Dependent Variable: PDB

Pengeluaran pemerintah dan defisit anggaran tidak mempengaruhi pertumbuhan produk domestik bruto dikarenakan nilai signifikansi dari hasil uji dibawah diatas 0,05. Pada

Tabel 2. dapat dilihat variasi perubahan variabel bebas (penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah dan defisit anggaran) dapat mempengaruhi variasi perubahan pertumbuhan domestik bruto sebesar 98,4 persen.

Tabel 2. Nilai koefisien determinasi penelitian

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.994 ^a	.989	.984	479600.8344

a. Predictors: (Constant), Defisit_Anggaran, Penerimaan_Pajak, Peng_Pemerintah

b. Dependent Variable: PDB

Penerimaan pajak memiliki peran penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial. Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) sebagai ukuran utama kinerja ekonomi sangat dipengaruhi oleh seberapa besar penerimaan pajak yang dapat dihimpun oleh pemerintah. Dari tahun 2014 hingga 2024, Indonesia mengalami fluktuasi dalam penerimaan pajak yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Dalam periode ini, upaya peningkatan penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan dan perluasan basis pajak dilakukan untuk mendukung peningkatan PDB. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2020), penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2014 tercatat sekitar Rp1.131,7 triliun, setara dengan 10,6% dari PDB, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp1.577 triliun.

Penerimaan pajak yang meningkat dapat mendukung investasi pemerintah dalam proyek-proyek pembangunan yang berdampak pada PDB. Misalnya, investasi dalam sektor infrastruktur yang didanai oleh pajak dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan mengurangi biaya logistik, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 mencapai 5,02% meskipun ada fluktuasi dalam penerimaan pajak. Penerimaan pajak Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2019, yang berkontribusi pada stabilitas fiskal dan memungkinkan pemerintah untuk melanjutkan program-program pembangunan. Meskipun demikian, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mengakibatkan penurunan tajam dalam penerimaan pajak akibat pengurangan aktivitas ekonomi, yang mengarah pada kontraksi ekonomi Indonesia sebesar -2,1% pada 2020 (BPS, 2021).

Namun, meskipun terdapat peningkatan penerimaan pajak, dampaknya terhadap pertumbuhan PDB Indonesia belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketergantungan Indonesia pada sektor-sektor ekonomi tertentu yang rentan terhadap perubahan harga komoditas serta tantangan dalam hal administrasi perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Bank Indonesia (2021), meskipun



penerimaan pajak Indonesia berhasil pulih pada tahun 2021 dengan angka pertumbuhan PDB sebesar 3,7%, namun ketergantungan pada sektor-sektor tertentu masih menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Ketidakstabilan harga komoditas global dan isu perpajakan yang tidak optimal menghambat potensi pertumbuhan jangka panjang yang lebih berkelanjutan.

Melihat periode 2022 hingga 2024, reformasi perpajakan yang terus digalakkan oleh pemerintah Indonesia, seperti melalui implementasi sistem perpajakan digital dan upaya penegakan hukum yang lebih tegas, berpotensi meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu indikasi positif adalah pertumbuhan PDB Indonesia yang diproyeksikan mencapai 5,5% pada tahun 2024, seiring dengan penguatan basis pajak dan peningkatan kualitas pengelolaan pajak (Bank Indonesia, 2021). Sektor-sektor baru seperti ekonomi digital dan sektor hijau (green economy) diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDB, yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, pendalaman pasar modal dan penguatan sektor industri juga diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak, yang akan memperkuat kemampuan fiskal pemerintah untuk terus mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun terdapat tantangan, penerimaan pajak yang dikelola secara efisien dan transparan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDB Indonesia dalam jangka panjang.

Reformasi perpajakan yang dilakukan sejak beberapa tahun terakhir di Indonesia bertujuan untuk memperbaiki kualitas pengelolaan pajak dan memperluas basis pajak. Salah satu langkah penting yang diambil oleh pemerintah adalah penerapan sistem e-filing dan e-billing yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara digital. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2020), implementasi sistem digital ini telah meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik. Dengan mengurangi kebocoran pajak dan meningkatkan akurasi data, penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat, sehingga pemerintah dapat lebih maksimal dalam mendanai program pembangunan yang berdampak langsung pada pertumbuhan PDB. Selain itu, reformasi ini juga mencakup perluasan objek pajak dan peningkatan penegakan hukum perpajakan untuk menanggulangi praktik penghindaran pajak. Bank Dunia (2021) menyebutkan bahwa negara dengan sistem perpajakan yang lebih efisien dan adil cenderung memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Meskipun langkah-langkah reformasi tersebut menunjukkan hasil yang positif, tantangan besar tetap ada dalam pengelolaan penerimaan pajak di Indonesia. Ketergantungan pada sektor ekstraktif seperti minyak dan gas serta komoditas lain yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga global, masih menjadi hambatan utama dalam memperbesar basis pajak domestik. Data dari Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan bahwa sektor pertambangan masih menyumbang bagian besar terhadap PDB Indonesia, namun sektor ini juga sangat rentan terhadap penurunan harga global yang berdampak langsung pada penerimaan pajak.



Diversifikasi sektor ekonomi menjadi kunci untuk memastikan stabilitas penerimaan pajak dan pertumbuhan PDB yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia perlu mendorong sektor-sektor baru, seperti ekonomi digital, manufaktur, dan energi terbarukan, agar bisa mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif dan memperluas basis pajak yang lebih inklusif dan tahan terhadap guncangan eksternal. Dengan demikian, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak secara efektif dan memperkuat sektor-sektor ekonomi yang lebih beragam.

KESIMPULAN

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan domestik bruto (PDB). Ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan pajak dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penurunan atau peningkatan dalam penerimaan pajak akan berpengaruh langsung pada kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pengelolaan penerimaan pajak yang efisien dapat mendorong perkembangan sektor-sektor penting yang berpengaruh pada PDB. Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan yang baik sangat penting dalam rangka mendukung kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alesina, A., Giannone, D., & Ghironi, F. (2022). Tax Reforms and Economic Growth: Evidence from a Panel of Countries." *Journal of International Economics*, 134, 103596.
- Alesina, A., & Ardagna, S. (2010). Large Changes in Fiscal Policy: Taxes versus Spending. *Tax Policy and the Economy*, 24, 35-68.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Produk Domestik Bruto (PDB) dan Pertumbuhannya Tahun 2020*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Produk Domestik Bruto (PDB) dan Pertumbuhannya Tahun 2021*.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Produk Domestik Bruto (PDB) dan Pertumbuhannya Tahun 2022*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Produk Domestik Bruto (PDB) dan Pertumbuhannya Tahun 2023*.
- Bank Dunia. (2021). *Indonesia Economic Quarterly: Facing the Pandemic and Beyond*. Jakarta: Bank Dunia.
- Bank Indonesia. (2021). *Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021-2024*. Jakarta: Bank Indonesia.



- Barro, R. J. (1974). Are Government Bonds Net Wealth? *Journal of Political Economy*, 82(6), 1095-1117.
- Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (1995). *Economic Growth*. McGraw-Hill.
- Batini, N., Callegari, G., & Melina, G. (2021). "Fiscal Policy and Economic Recovery: Insights from Recent Research." *Journal of Economic Dynamics & Control*, 129, 104355.
- Blanchard, O., & Johnson, D. R. (2013). *Macroeconomics* (6th ed.). Pearson.
- Blanchard, O., & Perotti, R. (2002). "An Empirical Characterization of the Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Output." *Quarterly Journal of Economics*, 117(4), 1329-1368.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Laporan Penerimaan Pajak 2019*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Penerimaan Pajak*.
- Gómez-Puig, M., & Sosvilla-Rivero, S. (2023). Fiscal Policy and Economic Stability: Evidence from the Eurozone. *European Economic Review*, 141, 104748.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2023). *Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Infrastruktur*.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. London: Macmillan.
- Kong, W., Li, X., & Liu, Y. (2021). Infrastructure Investment and Economic Growth: Evidence from Developing Countries." *International Journal of Economic Policy Studies*, 15(2), 55-72.
- Lucas, R. E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1),